



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan
Buruh Korea Selatan (Periode 2012-2015)

Skripsi

Oleh

Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto

2013330020

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan
Buruh Korea Selatan (Periode 2012-2015)

Skripsi

Oleh

Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto

2013330020

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi



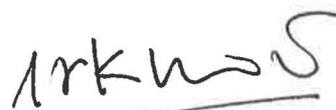
Nama : Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto
Nomor Pokok : 2013330020
Judul : Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan
Buruh Korea Selatan (Periode 2012-2015)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 22 Juni 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.



Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph.D.

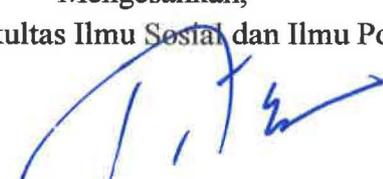


Anggota

Dr. A. Irawan J.H., Drs., M.A.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto
NPM : 2013330020
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi
Kebijakan Buruh Korea Selatan (Periode 2012-
2015)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,




Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto

Abstrak

Nama : Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto
NPM : 2013330020
Judul : Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan Buruh Korea Selatan (Periode 2012-2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana dampak KORUS FTA terhadap reformasi kebijakan buruh di Korea Selatan?”. Munculnya pertanyaan penelitian ini dipicu oleh adanya asumsi mengenai hubungan antara orientasi ekonomi serta liberalisasi perdagangan terhadap kebijakan buruh. Adanya liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan pengaruh terhadap kebijakan buruh. Penulis menganalisa perubahan-perubahan kebijakan buruh yang terjadi di Korea Selatan setelah KORUS FTA dilaksanakan secara efektif, yaitu pada tahun 2012, dan dibatasi hingga tahun 2015.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih lima bulan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti suatu kondisi dan pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Penulis menggunakan data sekunder berupa kajian dari literatur-literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel berita. Dalam penyusunan dan proses analisa, penulis menggunakan teori dan konsep seperti pluralisme, konsep kerjasama, konsep perjanjian perdagangan bebas, konsep kelas Karl Marx, teori gerakan buruh, teori hubungan industrial, serta tipe hubungan pemerintah dengan serikat buruh.

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang disebabkan oleh KORUS FTA sebagai bentuk liberalisasi perdagangan terhadap kebijakan buruh di Korea Selatan. Untuk mencegah terjadinya dampak buruk terhadap kelompok buruh, dicantumkan aturan khusus mengenai urusan ketenagakerjaan berlandaskan Deklarasi ILO dalam KORUS FTA. Namun, langkah ini ternyata tidak dapat menjamin hak-hak kaum buruh. Selain karena Korea Selatan tidak meratifikasi sejumlah konvensi fundamental ILO, keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan keuntungan juga menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan buruh di Korea Selatan.

Kata kunci: Korea Selatan, KORUS FTA, buruh, kebijakan buruh

Abstract

Name : Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto
NPM : 2013330020
Title : *Impact of KORUS FTA on South Korean Labor Policy Reform (2012-2015)*

This research aims to answer the research question which is “how is the impact of KORUS FTA on South Korean labor policy reform?”. The research question was triggered by the assumption about the relation of economic orientation and trade liberalization on labor policy. The author analyzed the changes on South Korean labor policies that occurred after KORUS FTA was implemented effectively on 2012 until 2015.

This research was conducted for approximately five months by using qualitative research method to examine a condition and its impact on other variable. The author used secondary data in the form of studies of literatures, such as books, journals, and news articles. Theories and concepts used in the analysis including pluralism, cooperation, free trade agreement, Karl Marx’s class theory, labor movement theory, industrial relations theory, and the type of relations between government and labor union.

This research found that there are several impacts caused by KORUS FTA as a form of trade liberalization on labor policies in South Korea. To prevent adverse impacts towards labor, there are specific rules regarding employment matters which are based on ILO Declaration on KORUS FTA. However, this step is proved unable to guarantee the rights of the workers. Aside from the fact that South Korea has not ratified several fundamental ILO conventions, the government’s desire to optimize profit has also been a decisive factor in the formulation of South Korean labor policies.

Keywords: South Korea, KORUS FTA, labor, labor policy

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul **“Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan Buruh Korea Selatan (Periode 2012-2015)”** ini dengan baik. Penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi program sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh KORUS FTA sebagai salah satu bentuk liberalisasi perdagangan terhadap perumusan kebijakan buruh di Korea Selatan. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian dalam kelompok bidang ilmu ekonomi politik internasional dalam studi ilmu internasional. Maka dari itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan studi ilmu hubungan internasional. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kemajuan di masa mendatang.

Bandung, 18 Juli 2017

Hyacinta Louisa Tresnaki Kiapmanto

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mewarnai perjalanan penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, terutama yang membantu dan memberikan dukungan selama penyusunan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai pegangan jiwa dan tempat mengadu di kala penulis mengalami kesulitan.
2. Keluarga yang selalu ada dan memberi dukungan: Ayah Alwi Kiapmanto, Bunda Arlina Husen, adik tersayang Benedicta Yobella, Oma Hartati Sudibja. Terima kasih atas segala dukungan moral, doa, tenaga, dan materiil yang telah dicurahkan bagi penulis selama perjalanan perkuliahan penulis.
3. Keluarga Sutedja yang grup WhatsApp-nya tak pernah sepi. Terima kasih Om, Tante, dan sepupu-sepupu: Kak Maria Augusta, Kak Kevin Hizkia, Teresa Handita, Antonio Albert, Michael Gregory, Pricilla Reyna, Rafael Leonard, Michaela Stevi yang selalu mendukung dan memberi hiburan.
4. Mas Sapta Dwikardana sebagai pembimbing dalam penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan serta izinnya sehingga penulis boleh menunda skripsi demi program *student exchange* ke Korea. Sesuai dengan perkataan Mas Sapta, *it was the best decision I've ever made and a very precious experience in my life!*

5. Dosen penguji, Bang Tian dan Mas Irawan, atas saran dan kritiknya yang sangat membantu dalam perbaikan penelitian ini, serta seluruh dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNPAR atas ilmu yang telah dibagikan kepada penulis selama berkuliah di HI UNPAR.
6. Sahabat-sahabat yang hadir dan mewarnai hari-hari penulis dengan berbagai karakter yang unik dan berbeda: Lusia Angela, Adinda Dewi, Delvine Toleng, Helmi Mia, Cindy Ayudia, Junika Budiyanto, Marcella Octaviany, Maria Yasinta, Irene Cindy, Kevin Abraham, dan Bella Marcella.
7. Sobat-sobat seperjuangan di Kampus UNPAR yang tak henti menjadi pengingat setia penulis untuk segera menyelesaikan penelitian: Herdiani Dewi, Clara Santi, Christian Arifin, Haerunisa Novaliery, Clarissa Paulina, Sharon Patricia, dan Ebenezer Setiawan.
8. Kakak-kakak sepuh di HI UNPAR yang menjadi panutan serta sumber informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya: Apri Diyana, Andriana Pradipta, dan Amanda Primanti.
9. Teman-teman yang mewarnai hari-hari penulis selama pertukaran pelajar di Sogang University: adik-adik Geng Sogang Indo (Ota dan Alvin), Alya Atila (yang juga adik angkatan di HI UNPAR tapi sama-sama berjuang di Korea di kampus yang berbeda), teman-teman *exchange student*, Sogang OIA *Best Staff* Sophia Park, 허그 언니 오빠 친구 동생들, 최고의 버디 한찬혜, 사랑하는 한국 동생들 장윤지 최미란, 서강대학교 국제한국학의 장대업 교수님,

방희경 교수님, 도지인 교수님 너무 감사드립니다. 한국에 있었던 모든 경험들은 최고였습니다!

10. 프로듀스101 시즌2 연습생들. 논문을 쓰다가 힘든 일들이 많이 있었지만 덕분에 잘 해낼 수 있었던 것 같습니다. 잘생긴 얼굴과 좋은 무대를 보면 역시 기분이 좋아졌거든요! 나의 일상이 되는 모든 한국 아이들에게도 감사한 마음을 전하고 싶습니다.

11. 2017년을 기적 같은 한 해로 만들어준 남자친구. 멀리 있지만 잘 챙겨주고 응원해줘서 고맙고 사랑합니다.

12. Seluruh teman, rekan, serta pihak-pihak yang hadir dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis di Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu. Maaf dan terima kasih.

“너와 함께한 시간 모두 눈부셨다.

날이 좋아서...

날이 좋지 않아서...

날이 적당해서...

모든 날이 좋았다.”

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Singkatan	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1 Survey Literatur.....	10
1.4.2 Kerangka Teoritis	14
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6 Sistematika Pembahasan	24
BAB II KORUS FTA (Korea - United States Free Trade Agreement)	25
2.1 Faktor Pendorong Kerjasama Korea Selatan dan Amerika Serikat	26
2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Hubungan Bilateral Korea Selatan - Amerika Serikat.....	26
2.1.2 Krisis Finansial Global 2008	29
2.2 Hubungan Ekonomi Korea Selatan dan Amerika Serikat.....	31
2.2.1 Aktivitas Ekspor-Impor Korea Selatan dan Amerika Serikat	31
2.2.2 Kerjasama dalam Sektor Keuangan dan Investasi.....	34
2.3 Korea-United States Free Trade Agreement (KORUS FTA)	38

2.3.1	Pengaturan Tarif Komoditas Ekspor dan Impor.....	40
2.3.2	Sektor Keuangan dan Investasi	41
2.3.3	Ketenagakerjaan dalam KORUS FTA	44
BAB III Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan Buruh di Korea Selatan.....		51
3.1	Pasar Tenaga Kerja di Korea Selatan.....	52
3.1.1	Dualisme Struktur Pasar Tenaga Kerja Korea Selatan.....	52
3.1.2	Kinerja Pasar Tenaga Kerja Korea Selatan	55
3.2	Karakteristik Buruh dan Organisasi Buruh Korea Selatan.....	58
3.2.1	Aktivitas Buruh dan Serikat Buruh di Korea Selatan.....	59
3.2.2	Federation of Korean Trade Unions (FKTU).....	63
3.2.3	Korean Confederation of Trade Unions (KCTU).....	66
3.3	Kebijakan Buruh Korea Selatan Sebelum KORUS FTA	69
3.3.1	Pembentukan Keterampilan Buruh.....	71
3.3.2	Kebijakan tentang Upah dan Jaminan Kesejahteraan Buruh	73
3.3.3	Pengaturan terhadap Pembentukan Serikat Buruh	77
3.3.4	Pengaturan terhadap Aktivitas Buruh dan Serikat Buruh.....	79
3.4	Kebijakan Buruh Korea Selatan Setelah KORUS FTA	81
3.4.1	Pembentukan Sistem Ketenagakerjaan yang Ramah terhadap Kaum Muda.....	84
3.4.2	Kebijakan tentang Upah dan Jaminan Kesejahteraan Buruh	87
3.4.3	Pengaturan terhadap Aktivitas Buruh dan Serikat Buruh.....	90
3.5	Analisis Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan Buruh di Korea Selatan	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		100
4.1	Kesimpulan.....	100
4.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		104

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Komoditas ekspor Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun 2011	32
Tabel 2.2	Nilai ekspor-impor Korea Selatan terhadap mitra dagang (2003-Agustus 2006)	33
Tabel 2.3	Nilai ekspor-impor Amerika Serikat terhadap mitra dagang (2003-Agustus 2006)	34
Tabel 2.4	Aliran investasi Korea Selatan ke Amerika Serikat menurut industrinya (tahun 2004-2006)	38
Tabel 2.5	Aliran Investasi Masuk (Inward Flow FDI) dan Aliran Investasi Keluar (Outward Flow FDI) Korea Selatan tahun 2011-2013	43
Tabel 3.1	Kebijakan Buruh Korea Selatan Sebelum dan Sesudah KORUS FTA	94

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Pertumbuhan ekspor Korea Selatan tahun 1966-1979 (Periode pemerintahan Presiden Park Chung-hee)	3
Gambar 1.2	Diagram hubungan antara pemerintah, pasar dan masyarakat dalam rezim internasional	14
Gambar 2.1	Investasi Asing di Korea Selatan tahun 1998-2003	36
Gambar 2.2	Tingkat keuntungan dari Investasi Amerika Serikat di Korea dan Global (tahun 1990-2005)	37

Daftar Singkatan

AS	Amerika Serikat
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
EOS	<i>Export Oriented Strategy</i>
EPL	<i>Employment Protection Legislation</i>
FKTU	<i>Federation of Korea Trade Unions</i>
GSP	<i>Generalized System of Preferences</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
KCTU	<i>Korean Confederation of Trade Unions</i>
KORUS FTA	<i>Korea – United States Free Trade Agreement</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
VER	<i>Voluntary Export Restraint</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan finansial global yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak yang cukup besar bagi negara-negara di dunia. Dampak-dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang pailit sehingga mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran dan akhirnya menghilangkan sumber pendapatan bagi banyak orang.¹ Dalam menanggulangi permasalahan yang timbul akibat krisis ekonomi global ini, terdapat beberapa karakteristik dalam strategi yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampak, yaitu: (1) integrasi. Krisis ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara sektor dan kebijakan-kebijakan, maka strategi menghadapi krisis harus memperhatikan keterkaitan antar sektor dan kebijakan yang dibuat pemerintah; (2) fleksibilitas. Strategi yang dilakukan harus merupakan strategi yang fleksibel agar mudah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi; (3) berbasis pasar. Kebijakan harus mengembalikan fungsi dari kekuatan pasar, terutama di sektor yang selama ini banyak dikuasai pemerintah; (4) komunikasi yang jelas. Strategi menghadapi dampak krisis ekonomi global harus disampaikan dengan

¹ Uma Rani dan Raymond Torres, "Introduction," *The Global Crisis: Causes, Responses and Challenges* (Geneva: International Labour Organization, 2011), 1.

jas dan konsisten oleh para pembuat kebijakan.² Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan contoh dari negara yang terkena dampak dari krisis ekonomi dan finansial global, meski skala dampak yang dirasakannya berbeda.

Pada tahun 1955, hubungan dagang secara bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dimulai tanpa adanya hambatan dagang, kecuali VERs (*Voluntary Export Restraints*). Hambatan dagang ini diberlakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk kebijakan proteksionisme terhadap produk domestiknya.³ Menurut Wade, Westphal, dan Martin Bienefeld, keterlibatan pemerintah merupakan kunci bagi kesuksesan Korea Selatan sebagai negara industri baru. Strategi yang digunakan pemerintah untuk menghadapi VER dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat membutuhkan fleksibilitas dalam hal perubahan jenis produk dan pasar, peningkatan kualitas produk dan inovasi, dan penyesuaian struktur harga.⁴

Sebagai bentuk balas budi Amerika Serikat terhadap Korea Selatan dan negara-negara lain yang berada di pihak Amerika Serikat pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat memberikan fasilitas berupa GSP (*Generalized System of Preferences*) yaitu penetapan kuota impor oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk dari negara sahabat. Selain itu, adanya ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional ke negara berkembang turut memicu perkembangan teknologi, industri, dan manajemen di Korea Selatan. Korea Selatan kemudian

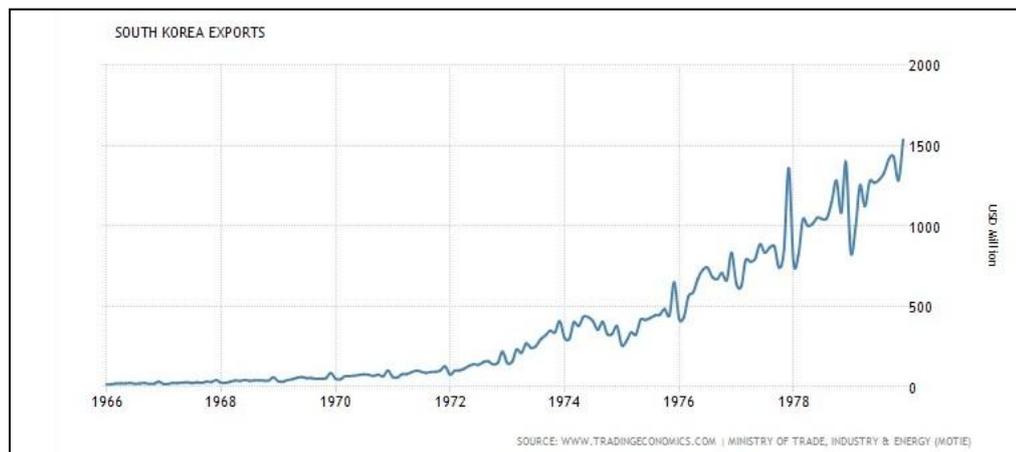
² Carlo Cottarelli dan Jose Vinals, "A Strategy for Renormalizing Fiscal and Monetary Policies in Advanced Economies," dalam *Reconstructing the World Economy*, ed. Olivier Blanchard, dan Il Sa-kong (Washington DC: International Monetary Fund, 2010), 3-4.

³ David Glover, "Bypassing Barriers: Lessons from the Asian NICs," dalam *The Developing Countries in World Trade*, ed. Diana Tussie dan David Glover (Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1993), 172.

⁴ *Ibid.*, 174.

memanfaatkan insentif tersebut dan semakin mengembangkan sektor industri. Berdasarkan jenis-jenis strategi industrialisasi, Korea Selatan menerapkan strategi *Export Oriented Strategy* (EOS).

EOS memiliki beberapa karakteristik. Pertama, negara yang melakukan EOS memilih teknologi padat karya (*labour intensive*) di mana negara-negara penganut EOS ini menggantungkan keuntungan komparatif pada murahnya tenaga kerja. Kedua, adanya efek distribusi pendapatan langsung kepada masyarakat. Teknologi padat karya membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga banyak angkatan kerja yang dapat memperoleh pekerjaan. Ketiga, alokasi faktor produksi yang lebih efisien akibat adanya stimulus dari kompetisi internasional. Keempat, EOS berorientasi pada perdagangan bebas, maka negara-negara penganut EOS akan melakukan perdagangan bebas.⁵



Gambar 1.1 Pertumbuhan ekspor Korea Selatan tahun 1966-1979 (Periode pemerintahan Presiden Park Chung-hee)

Sumber: *Trading Economics*⁶

⁵ Ibid., 86-87.

⁶“South Korea Exports,” *Trading Economics*, diakses pada 15 Maret 2017, <http://www.tradingeconomics.com/south-korea/exports>

Melihat empat karakteristik EOS di atas, Korea Selatan merupakan negara yang sukses dalam menerapkan EOS. Hasil produksi Korea Selatan dapat bersaing di pasar global karena Korea Selatan menawarkan produk berkualitas dengan harga yang relatif rendah. Harga produk Korea Selatan relatif rendah karena biaya produksinya yang rendah yang disebabkan karena upah buruh yang rendah. Pengendalian terhadap upah buruh ini merupakan salah satu bentuk dari intervensi positif pemerintah untuk memacu perkembangan sektor industri dan ekonomi domestik. Selain itu, Korea Selatan yang bergantung pada pasar internasional pun selalu berusaha menjalin hubungan ekonomi dan hubungan dagang yang baik dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. Pada tahun 2007, Korea Selatan dan Amerika Serikat menandatangani persetujuan untuk melakukan perdagangan bebas secara bilateral yang kemudian disebut *KORUS Free Trade Agreement* (Korea - US *Free Trade Agreement*).⁷

Pada tahun 2006, Menteri Perekonomian Korea Selatan, Choi Seok-young menyatakan bahwa Korea Selatan mengharapkan KORUS FTA dapat memperkuat hubungan bilateral dalam hal ekonomi, terutama perdagangan dan investasi, serta dalam bidang politik dan kepentingan strategis kedua negara.⁸ Setelah diajukan pada tahun 2006, pada tahun 2012 KORUS FTA diberlakukan secara efektif, sebagai salah satu strategi pemulihan Korea Selatan dan Amerika Serikat dari krisis ekonomi dan finansial global.

⁷ "U.S. - Korea Free Trade Agreement," Office of the United States Trade Representative, diakses pada 27 Maret 2016, <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta>.

⁸ Kozo Kiyota dan Robert M. Stern, *Economic Effects of a Korea-U.S. Free Trade Agreement* (Washington DC: Korea Economic Institute of America, 2007), 3.

KORUS FTA merupakan salah satu upaya dari pemerintah Korea Selatan untuk melakukan liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan ini dipandang sebagai jalan yang menguntungkan dan dapat meningkatkan ekonomi negara. Namun, menurut D.J. Robbins, liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan efek yang buruk terhadap kaum pekerja atau kaum buruh.⁹

Melalui uraian di atas, terdapat hubungan antara orientasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan (dalam hal ini melalui KORUS FTA) terhadap kebijakan buruh di Korea Selatan, maka judul dari penelitian ini adalah:

Dampak KORUS FTA terhadap Reformasi Kebijakan Buruh di Korea Selatan (2012-2015)

1.2 Identifikasi Masalah

Presiden Park Chung-hee adalah presiden Korea Selatan yang menginisiasi adanya pembangunan ekonomi di Korea Selatan dengan menerapkan rencana pembangunan ekonomi yang sistematis. Pada awal masa pemerintahan Presiden Park Chung-hee, Korea Selatan tidak memiliki keunggulan di bidang modal, teknologi, maupun sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki Korea Selatan saat itu adalah melimpahnya tenaga kerja. Maka dari itu, Presiden Park Chung-hee menerapkan strategi industrialisasi dengan menggunakan teknologi padat karya. Namun, agar produksi Korea Selatan dapat bersaing di pasar global dengan harga rendah, pemerintah harus menekan biaya produksi, salah satunya adalah dengan cara menekan upah buruh.

⁹ Zouhair Mrabet dan Charfeddine Lanouar, "The Impact of Trade Liberalization on Labor Market of Developing Countries: What can Literature tell us?," *Journal of Economics and Behavioral Studies* 4, no. 6 (Juni 2012): 308.

Pada masa revolusi industri tersebut, pemerintah dan perusahaan-perusahaan memandang serikat buruh sebagai suatu entitas yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan perkembangan ekonomi.¹⁰ Serikat buruh sendiri pada dasarnya merupakan suatu entitas yang dapat menjadi penyeimbang kekuatan antara para pekerja dan pihak yang mempekerjakan. Serikat buruh juga dapat menjadi organisasi yang penting untuk mendiskusikan suatu isu, membentuk rasa persatuan, dan instrumen yang dapat membantu pencapaian tujuan bersama.

Pada masa pemerintahan Presiden Park Chung-hee, kebijakan buruh bersifat represif. Kebijakan buruh saat itu saat membatasi kegiatan serikat buruh, di mana serikat buruh tidak diperkenankan mengintervensi ketika terdapat permasalahan terkait buruh, adanya penangkapan terhadap pemimpin gerakan-gerakan buruh, serta banyaknya ketidakadilan terhadap kaum buruh.¹¹ Meskipun saat itu Korea Selatan mengalami perkembangan ekonomi yang cukup signifikan, banyak hak-hak kaum buruh yang dilanggar akibat kebijakan buruh yang represif.

Pada tahun 1987, Korea Selatan mengalami demokratisasi. Demokratisasi di Korea Selatan memberikan dampak yang cukup besar yaitu mengendurnya kontrol pemerintah terhadap urusan buruh. Serikat buruh diberi kebebasan untuk beraktivitas, termasuk melakukan aksi protes dan pemogokan, serta diberi kewenangan untuk turut serta dalam perundingan dengan pemerintah dan

¹⁰ Ho Keun Song, *Labour unions in the Republic of Korea: Challenge and choice* (Geneva: International Institute for Labour Studies, 1999), 1.

¹¹ Ibid.

perusahaan.¹² Demokratisasi dalam pemerintahan Korea Selatan membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 1993, pemerintah Korea Selatan menetapkan Undang-undang Ketenagakerjaan Dasar dan memperkenalkan Sistem Asuransi Kerja pada tahun 1995.¹³ Pada masa ini, upah buruh mengalami peningkatan dan gerakan buruh memegang peran penting dalam masyarakat Korea Selatan.

Namun, krisis finansial yang terjadi pada akhir tahun 1997 membuat hubungan antara buruh dan pihak pemberi kerja dan pemerintah kembali memburuk. Krisis finansial menimbulkan terjadinya restrukturisasi perusahaan dan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Pada tahun 1998, diadakan diskusi antara tiga pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, dan pekerja yang menghasilkan Kesepakatan Sosial untuk Mengatasi Krisis Ekonomi.¹⁴ Kesepakatan ini membantu pemenuhan hak-hak buruh dengan mengizinkan serikat buruh untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Selain itu, kesepakatan ini juga meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dengan memperkenalkan *redundancy dismissal system*¹⁵ dan *worker dispatch system*¹⁶.

¹² John W. Budd, *Labor Relations: Striking a Balance Fourth Edition* (New York: McGraw-Hill Education, 2013), 448.

¹³ Jungui Lee dan Haesang Jeon, "South Korea: Public Policy," *Global Policy Brief*, no. 6 (Desember 2009): 2, diakses pada 30 Maret 2016, www.bc.edu/agingandwork.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ *Redundancy dismissal system* adalah suatu sistem pengurangan tenaga kerja dengan secara tidak langsung. Perusahaan menghilangkan satu posisi atau tugas sehingga tidak ada karyawan yang perlu mengerjakannya. Secara otomatis, karyawan yang bekerja di posisi tersebut akan kehilangan pekerjaannya.

"Dismissal & termination of employment," *Fair Work Commission*, diakses pada 1 April 2016, <https://www.fwc.gov.au/resolving-issues-disputes-and-dismissals/dismissal-termination-redundancy>

¹⁶ *Worker dispatch system* adalah suatu sistem dimana karyawan disalurkan melalui agen. Karyawan tersebut tidak tercatat secara resmi sebagai karyawan perusahaan dimana ia ditempatkan melainkan tetap menjadi karyawan dari agennya.

Memasuki dekade 2000-an, fokus dalam kebijakan buruh bergeser sehingga lebih mendukung terciptanya lapangan kerja dan mengurangi dualisme dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pelatihan tenaga kerja agar kualitas tenaga kerja Korea Selatan dapat meningkat. Hal ini perlu dilakukan karena permintaan dari sektor bisnis terhadap tenaga kerja semakin meningkat, terutama permintaan akan tenaga kerja terampil. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan rancangan kebijakan untuk melindungi tenaga kerja non-reguler dan hak-haknya.¹⁷

Pada masa sistem ekonomi kapitalis yang dipimpin oleh negara, pemerintah banyak melakukan intervensi terhadap sektor bisnis. Akan tetapi, seiring dengan berubahnya struktur kompetisi pasar internasional, pemerintah Korea Selatan terpaksa sedikit demi sedikit lepas tangan dari urusan perekonomian. Hal ini terjadi juga karena adanya tekanan dari pasar global sehingga Korea Selatan harus membuka pasar dalam negeri dan mengikuti kecenderungan pasar yaitu dengan melakukan perdagangan bebas. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas, modal dapat berpindah dengan lebih mudah ke tempat yang memiliki biaya buruh rendah dan regulasi yang tidak terlalu ketat.

Hal ini menyebabkan adanya proses produksi yang lebih fleksibel. Untuk menyesuaikan pasar tenaga kerja dengan fleksibilitas produksi, maka Korea Selatan juga mulai menerapkan kebijakan ketenagakerjaan atau kebijakan buruh yang lebih fleksibel.¹⁸ Fleksibilitas ketenagakerjaan ini dapat menimbulkan

Sungteak Kim, "The Worker Dispatch System of Korea: Status and Challenges" (paper dipresentasikan pada 8th Northeast Asia Labor Forum, Seoul, Korea Selatan, 28 Oktober, 2010).

¹⁷ Op.cit., Jungui Lee dan Haesang Jeon.

¹⁸ Op.cit., Ho Keun Song, 16.

ketidakstabilan dalam pekerjaan; buruh atau pekerja tidak digaji sesuai kontribusi dan senioritas melainkan berdasarkan pencapaian dan kemampuan; buruh atau pekerja diwajibkan menguasai berbagai keterampilan untuk mengantisipasi adanya diversifikasi produk atau penggunaan teknologi baru.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian dibatasi pada dampak yang disebabkan oleh KORUS FTA (*Korea-United States Free Trade Agreement*) terhadap perubahan kebijakan buruh di Korea Selatan. Pembatasan waktu dalam penelitian ini yaitu tahun 2012-2015. Dalam periode ini, terdapat dua rezim yang berbeda, yaitu masa pemerintahan Presiden Lee Myung-bak (2012-2013) dan Presiden Park Geun-hye (2013-2017).

Aktor yang menjadi objek utama penelitian ini adalah pemerintah Korea Selatan sebagai pihak pembuat kebijakan serta kelompok buruh di Korea Selatan sebagai pihak yang terkena dampak akibat adanya perubahan dalam kebijakan buruh. Selain itu, objek lainnya dalam penelitian ini adalah kebijakan buruh yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai acuan adalah:

“Bagaimana dampak KORUS FTA terhadap reformasi kebijakan buruh di Korea Selatan?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dari perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan Amerika Serikat terutama terhadap kebijakan buruh di Korea Selatan;
2. Untuk menggambarkan relasi antara orientasi ekonomi negara terhadap kebijakan ekonomi domestik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan informasi mengenai kebijakan buruh di Korea Selatan;
2. Untuk memperkaya pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan hubungan pemerintah dan kaum buruh;
3. Untuk mendorong adanya penelitian selanjutnya di masa mendatang mengenai topik terkait.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Survey Literatur

Berdasarkan artikel "*The Impact of Trade Liberalization on Labor Market of Developing Countries: What can Literature tell us?*" yang ditulis oleh Zouhair Mrabet dan Charfeddine Lanouar (2012), liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan adanya ketidakmerataan dalam upah dan

permintaan akan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena liberalisasi perdagangan biasanya diikuti dengan transfer teknologi. Mayoritas negara berkembang tidak memiliki teknologinya sendiri, melainkan mengimpor dari negara maju.

Namun, dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa asumsi di atas dapat berubah tergantung dengan kebijakan yang diambil pemerintah negara bersangkutan. Pengaruh yang diberikan oleh liberalisasi perdagangan terhadap pasar tenaga kerja tidak sama di setiap negara. Ketika terjadi liberalisasi perdagangan, negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi terutama pada produk yang dinilai memiliki keunggulan di segi faktor produksinya. Pemerintah Korea Selatan sendiri dalam hal ini memilih untuk menerapkan sistem padat karya karena memiliki tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Akibat kebijakan ini, cukup banyak tenaga kerja yang terserap di Korea Selatan pada awal masa liberalisasi perdagangan. Kebijakan lain yang diterapkan oleh negara-negara Asia termasuk Korea Selatan setelah memasuki liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja lokal dapat menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja dari pihak pemberi kerja.¹⁹

Kozo Kiyota dan Robert M. Stern (2007) dalam penelitiannya yang kemudian diberi judul “*Economic Effects of a Korea-U.S. Free Trade Agreement*”, mengkaji kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh KORUS FTA terhadap ekonomi kedua negara menggunakan analisis komputasi

¹⁹ Op.cit., Zouhair Mrabet dan Charfeddine Lanouar, 307-315.

berbasis *Michigan Model of World Production and Trade*. Dengan menggunakan Michigan Model ini, faktor yang diteliti adalah eliminasi hambatan perdagangan antara kedua negara. Salah satu tujuan yang ingin dicapai Korea Selatan melalui KORUS FTA adalah peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, dilakukan analisis mengenai dampak yang ditimbulkan KORUS FTA terhadap sektor ketenagakerjaan. Berbagai variabel dan faktor dimasukkan ke dalam model untuk mendapatkan hasil analisis mengenai perubahan yang terjadi di sektor tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis, akibat adanya liberalisasi perdagangan bilateral, akan terjadi perubahan dalam ketenagakerjaan sektoral. Sektor-sektor tertentu akan mengalami peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, sementara sektor-sektor lainnya akan mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, hasil analisis komputasi dengan menggunakan Michigan Model menunjukkan bahwa Korea Selatan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila melakukan liberalisasi perdagangan yang lebih luas atau secara multilateral.²⁰

Dalam *paper* berjudul “*Economic and Social Consequences of Globalization: The Case of South Korea*” yang disusun oleh You Jong-il dan Lee Ju-ho (2011), disebutkan bahwa proses globalisasi dalam ekonomi dapat menciptakan banyak kesempatan baru, tetapi juga dapat menimbulkan resiko. Dampak dari liberalisasi ekonomi di Korea Selatan terhadap pasar tenaga kerja menurut You Jong-il dan Lee Ju-ho kurang dapat terlihat karena proses

²⁰ Op.cit., Kozo Kiyota dan Robert M. Stern, 1-58.

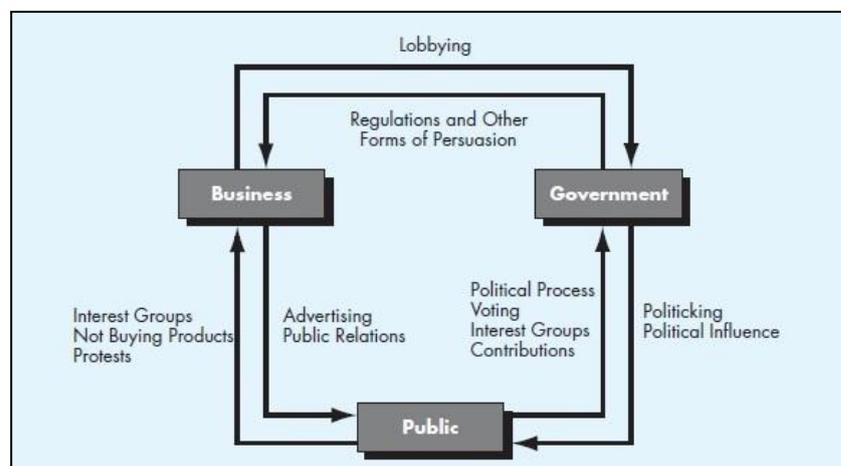
liberalisasi yang sifatnya sangat bertahap. Adanya transisi dari masa pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis pada tahun 1987 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi buruh di Korea Selatan. Kebijakan buruh yang represif pada masa pemerintahan otoriter dihapuskan sehingga melahirkan kelompok buruh yang konfrontatif. Maka terjadilah peningkatan upah buruh hingga sebesar 22% pada masa tahun 1988-1990. Perubahan lain pada kebijakan buruh di Korea Selatan terjadi pasca krisis finansial tahun 1997. Globalisasi diikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sistem internasional. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam sistem internasional, Korea Selatan harus berani membenahi diri dengan mengubah kebijakan-kebijakan domestiknya, salah satunya kebijakan buruh yang sangat berkaitan dengan perekonomian Korea Selatan.

Di Korea Selatan, serikat buruh dikelola oleh masing-masing perusahaan, bukan di tingkat industri maupun nasional seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Maka, sulit bagi serikat buruh di Korea Selatan untuk melakukan negosiasi di tingkat nasional karena serikat buruh dari perusahaan-perusahaan yang berbeda memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Itulah sebabnya seringkali gerakan buruh di Korea Selatan kurang berhasil.²¹

²¹ Jong-II You dan Ju-Ho Lee, "Economic and Social Consequences of Globalization: The Case of South Korea," *CEPA Working Paper* I, no. 17 (Februari 2011): 1-29.

1.4.2 Kerangka Teoritis

Penelitian ini merupakan penelitian dalam lingkup Ilmu Hubungan Internasional yang berfokus dalam kelompok bidang ilmu Ekonomi Politik Internasional, yang salah satunya membahas pola interaksi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam rezim internasional. Dalam menyusun penelitian ini, digunakan diagram interaksi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam rezim internasional.



Gambar 1.2 Diagram hubungan antara pemerintah, bisnis dan masyarakat dalam rezim internasional

Sumber: *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*²²

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan nama pluralisme. Pluralisme memiliki beberapa asumsi, yaitu: (1) aktor-aktor non-negara merupakan entitas yang penting dalam hubungan internasional. Aktor non-negara memegang peran penting dalam penentuan agenda politik berdasarkan berbagai isu yang diperjuangkannya; (2) negara bukan aktor satu-satunya dalam hubungan internasional. Kebijakan,

²² Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz, *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management* (Mason, OH: Cengage Learning, 2009), 455.

keputusan, dan kepentingan yang dimiliki negara dihasilkan berdasarkan adanya proses kompetisi dan kerja sama dari aktor-aktor non-negara, seperti individu dan kelompok kepentingan; (3) agenda dalam politik internasional merupakan agenda yang luas, bukan hanya mencakup keamanan dari segi militer, melainkan mencakup bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan juga dapat menjadi hal penting dalam hubungan internasional.²³

Dalam hubungan internasional juga terdapat konsep kerjasama internasional. Menurut Kalevi J. Holsti, terjadinya kerjasama internasional didorong oleh karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara. Holsti mendefinisikan kerjasama sebagai (1) pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu; (2) pandangan dari suatu negara bahwa kebijakan negara lain akan membantu negara tersebut mencapai kepentingannya; (3) persetujuan antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan; (4) aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; dan (5) transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.²⁴

Kerjasama internasional terlihat dalam hubungan ekonomi internasional. Inti dari sistem hubungan ekonomi internasional, sebagai subsistem ekonomi global adalah adanya hubungan yang berkembang sebagai

²³ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism* (London: Macmillan Publishing Company, 1990), 192-193.

²⁴ Kalevi J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, Jilid II, diterjemahkan oleh M. Tahrir Azhari (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988), 652-653.

hasil pergerakan barang dan faktor produksi internasional serta hubungan di sektor moneter dan keuangan internasional.²⁵

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional adalah liberalisasi perdagangan resiprokal. Dalam liberalisasi perdagangan ini terjadi hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang bekerjasama. Selain itu, terjadi pula distribusi pendapatan dari aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas perdagangan.²⁶ Jenis kerjasama yang terjadi dalam liberalisasi perdagangan resiprokal bisa berbentuk kerjasama bilateral, plurilateral, dan multilateral.²⁷

Perdagangan bebas merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh negara untuk memperoleh keuntungan bagi perekonomian domestik. Menurut David Ricardo, setiap negara memiliki keuntungan komparatif. Akibat adanya keuntungan komparatif tersebut, diperlukan adanya spesialisasi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Negara-negara harus melakukan hubungan perdagangan agar kebutuhan dalam negerinya bisa terpenuhi.²⁸

Negara bisa melakukan hubungan perdagangan dengan membuat perjanjian perdagangan bebas. Menurut Baier et al., perjanjian perdagangan bebas adalah bagian dari perjanjian integrasi ekonomi yang bertujuan untuk

²⁵ Yuriy Kozak et al., *An Introduction to International Economic Relations*, diedit oleh Yuriy Kozak dan Temur Shengelia (Tbilisi: Universal Publishing House, 2014), 17.

²⁶ Arye L. Hillman, Ngo Van Long, dan Peter Moser, "Modelling Reciprocal Trade Liberalization: The Political-economy and National-warfare Perspectives," *Swiss Journal of Economics and Statistics*, Vol 131, no. 3 (1995): 503-505.

²⁷ Pedro J. Martinez Edo, "Reciprocal liberalization: Bilateral, plurilateral or multilateral?," dalam *Trade beyond Doha: Prospects for the Asia-Pacific Least Developed Countries* (New York: United Nations, 2011), 60.

²⁸ William J. Baumol dan Alan S. Binder, *Economics: Principles and Policy* (Boston: Cengage Learning, 2008), 50.

mengurangi hambatan yang dikendalikan oleh kebijakan terhadap arus barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan lain-lain.²⁹

Kesepakatan untuk melakukan perdagangan bebas dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara. Pemerintah adalah institusi dalam negara yang membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum di suatu negara.³⁰ Pemerintah suatu negara memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lain untuk memajukan ekonomi dalam negerinya. Kesepakatan perdagangan bebas yang dibuat oleh negara merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri dari suatu negara. Kebijakan yang dibuat oleh negara ini tentu dapat mempengaruhi berbagai aspek, terutama memberi pengaruh terhadap masyarakat dan komunitas-komunitas tertentu.³¹

Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melakukan pilihan-pilihan tertentu hingga akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang dinilai dapat memberi keuntungan bagi negara. Pilihan-pilihan dan pertimbangan yang harus dilakukan oleh negara di antaranya yaitu: (1) mempertimbangkan unsur yang lebih penting antara hak-hak individu dan tanggung jawab bersama (*collective responsibility*) dari seluruh masyarakat; (2) memilih antara memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh masyarakat atau memperbolehkan kelompok tertentu memperoleh kemudahan sendiri; (3)

²⁹ Scott L. Baier et al., "Do Economic Integration Agreements Actually Work? Issues in Understanding the Causes and Consequences of the Growth of Regionalism," *The World Economy* (2008): 461.

³⁰ Neal Ryan, Rachel Parker, dan Kerry Brown, *Government, Business, and Society* (Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2003), 3.

³¹ *Ibid.*, 14.

mempertimbangkan prinsip yang sebaiknya diterapkan apakah berupa standar moral yang seragam atau keterbukaan terhadap perbedaan dan keberagaman.³²

Aktor yang mendapat pengaruh dari adanya kebijakan yang dibuat oleh negara, terutama kebijakan-kebijakan publik adalah masyarakat. Maka, dalam membuat kebijakan, negara harus mempertimbangkan pula reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Masyarakat yang ada di suatu negara melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mekanisme dari aktivitas ekonomi ini kemudian dikenal sebagai sistem ekonomi.³³ Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi, salah satunya adalah sistem ekonomi kapitalisme.

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang disebabkan oleh adanya inovasi di bidang teknologi, serta adanya produksi massa dalam industrialisasi. Produksi komoditas adalah inti dari ekonomi kapitalisme.³⁴ Namun, menurut Karl Marx, ekonomi secara natural bersifat kapitalis di mana terdapat keadaan tidak seimbang dan eksploitatif. Maka dari itu, kegiatan ekonomi bersifat *zero-sum game* di mana terdapat pihak yang menang dan yang kalah atau untung dan rugi. Di dalam sistem ekonomi tersebut terdapat kelas-kelas, ada kelas yang lebih berkuasa dibanding kelas lainnya.

³² Ibid., 8.

³³ Ibid., 19.

³⁴ Ibid.

Karl Marx membagi kelas-kelas dalam masyarakat berdasarkan dua kriteria, yaitu kepemilikan atas faktor produksi dan kemampuan mengendalikan tenaga kerja. Berdasarkan kriteria tersebut, Karl Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis adalah kaum yang memegang kepemilikan atas faktor produksi dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan tenaga kerja. Sementara itu, proletar adalah mereka yang sama sekali tidak memegang kepemilikan atas faktor produksi dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tenaga kerja, melainkan mereka menjual tenaga kerja mereka sendiri.³⁵ Di tengah masyarakat yang dibedakan menjadi dua kelas ini, seringkali terjadi eksploitasi dari kaum borjuis terhadap kaum proletar.

Buruh yang merupakan kaum proletar dipandang sebagai salah satu komoditas. Buruh tidak memegang kepemilikan atas faktor produksi dan juga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tenaga kerja, melainkan mereka menjual tenaga kerja mereka sendiri. Mereka bekerja untuk memperoleh gaji atau upah dan terlibat dalam proses produksi.³⁶ Buruh merupakan kelompok dalam masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi negara pun pada umumnya akan mempengaruhi kaum buruh.

Gerakan buruh merupakan salah satu langkah kaum buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Terdapat dua unsur penting dalam *labor*

³⁵ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories & Approaches* (New York: Oxford University Press, 2010), 189.

³⁶ Op.cit., Neal Ryan, Rachel Parker, dan Kerry Brown, 19-20.

movement theory yang dikemukakan oleh Mark Perlman, yaitu (1) faktor pendorong terbentuknya gerakan buruh serta fungsi sosial dan ekonominya; serta (2) konsekuensi ekonomi dari perilaku serikat buruh di pasar, terutama terhadap fungsi mekanisme harga.³⁷ Sementara itu, aktor yang memegang peranan penting dalam gerakan buruh adalah serikat buruh.

Serikat buruh merupakan institusi yang dimiliki oleh kaum buruh. Institusi adalah struktur organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan digerakkan oleh tujuan tersebut. Institusi menggerakkan sekelompok massa untuk meraih tujuan sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, tekanan politik, sosial, dan ekonomi bisa mengubah struktur institusi dalam suatu negara atau kelompok masyarakat.³⁸ Serikat buruh adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh sekelompok buruh yang bersatu dengan tujuan memperjuangkan hak-hak dan mempengaruhi kondisi kerja mereka.³⁹ Melalui serikat buruh, para buruh dapat terlibat dalam perundingan kolektif bersama pihak pemberi kerja dan juga pemerintah.

Serikat buruh dipandang sebagai unsur penyeimbang yang memberi kekuatan di segi ekonomi dan politik bagi kaum pekerja. Serikat buruh juga merupakan organisasi penting di dalam masyarakat di mana individu-individu yang berbeda, tetapi memiliki kepentingan serupa, dapat bersosialisasi, berdiskusi, berusaha mencapai tujuan yang sama, dan membentuk rasa sebagai satu komunitas. Dari perspektif kaum pluralis, serikat buruh dapat

³⁷ Mark Perlman, "Labor Movement Theories: Past, Present, and Future," *Industrial and Labor Relations Review*, Vol 13, no. 3 (April 1960): 338.

³⁸ *Ibid.*, 3.

³⁹ *Op.cit.*, John W. Budd, 4.

memberikan kontribusi dalam masyarakat demokratis modern. Masyarakat yang demokratis harus berjalan selaras dengan gerakan buruh yang bebas dan independen.⁴⁰

Hubungan antara serikat buruh (pekerja) dengan pemberi kerja disebut sebagai *industrial relations* atau hubungan industrial. Hubungan industrial muncul karena adanya interaksi antara pekerja dan pemberi kerja dalam kegiatan industri modern yang diatur oleh pemerintah dalam berbagai aspek.⁴¹ Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan industrial adalah manajemen (pihak pemberi kerja), pekerja (termasuk buruh dan serikat buruhnya), serta pemerintah yang bertugas membuat peraturan.⁴² Dalam hubungan industrial, terdapat dua jenis hubungan yang dominan, yaitu hubungan kooperatif dan konflik.⁴³

Sistem ekonomi yang kapitalis menimbulkan kecenderungan terjadinya eksploitasi kaum buruh oleh kaum penguasa, baik pemerintah maupun sektor bisnis. Pemerintah memiliki rencana dan orientasi ekonomi sendiri yang dinilai dapat memberi keuntungan bagi negara dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan membuat serangkaian kebijakan yang dinilai penting untuk mencapai tujuan ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan ketenagakerjaan atau kebijakan buruh yang sangat mempengaruhi

⁴⁰ Ibid., 51.

⁴¹ T.N. Chabra dan R.K. Suri, *Dynamics of Industrial Relations* (New Delhi: Pentagon Press, 2007), 26-28.

⁴² Harry C. Katz dan Thomas A. Kochan, *An Introduction to Collective Bargaining and Industrial Relations* (New York: The McGraw-Hill Companies, 2004), 3-4.

⁴³ Op.cit., T.N Chabra dan R.K. Suri, 29-30.

kaum buruh. G. Cella dan T. Toeu mengemukakan empat tipe hubungan pemerintah dengan serikat buruh⁴⁴, yaitu:

1. *Repression*: pada tipe ini, pemerintah sangat menekan aktivitas serikat buruh karena serikat buruh yang aktif dan independen dikhawatirkan akan menekan pemerintah dan sektor bisnis.

2. *Tolerance*: pada tipe ini, pemerintah memberi kebebasan bagi kaum buruh untuk berserikat dan menjalankan fungsinya dengan campur tangan pemerintah yang seminim mungkin.

3. *Intervention*: pada tipe ini, pemerintah memberi dukungan terhadap dibentuknya serikat buruh, tetapi campur tangan pemerintah masih tetap ada. Intervensi pemerintah dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan hasil yang dicapai oleh para buruh.

4. *Neo-corporatism*: pada tipe ini, terdapat kerja sama antara pemerintah dengan serikat buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh. Kerja sama dilakukan dengan cara melibatkan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan dalam hal yang berkaitan dengan buruh, misalnya pembentukan kebijakan mengenai buruh.

Salah satu kebijakan buruh adalah mengenai fleksibilitas buruh. Fleksibilitas buruh merupakan kapasitas pengaturan dari pasar kerja untuk mengubah lingkungan eksternal dan kondisi perusahaan dan industri. Fleksibilitas buruh dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) *numeral flexibility*, seperti jumlah tenaga kerja; (2) *functional flexibility*, seperti

⁴⁴ G. Cella dan T. Toeu, "National Trade Movement", dalam *Comparative Labor Law and Industrial Relations*, ed. R. Blanpain (Deventer: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1982), 180-193.

pengetahuan, keterampilan, dan sistem rotasi kerja; dan (3) *wage flexibility*, seperti penentuan dan pengaturan upah.⁴⁵

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Menurut Robert K. Yin, studi kasus digunakan ketika suatu penelitian berfokus pada hubungan sebab-akibat atau menjelaskan suatu fenomena.⁴⁶ Dalam penelitian studi kasus, metode penelitian yang umumnya dipakai adalah metode kualitatif, yang akan meneliti suatu kondisi dan pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisa terhadap dampak dari suatu peristiwa terhadap sebuah sistem yang sudah ada di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif agar menghasilkan hasil penelitian yang bersifat kualitas, makna, konteks, atau kesan dari objek yang diteliti.⁴⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gejala yang terjadi secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari narasumber dan data sekunder lainnya. Adapun data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini merupakan data sekunder yaitu berupa kajian dari literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, maupun artikel dan berita.

⁴⁵ Friedrich Klau dan Axel Mittelstadt, "Labour Market Flexibility and External Price Shocks," dalam *OECD Economics and Statistics Dept. Working Papers*, Volume 24 (1985): 8-14.

⁴⁶ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods Third Edition*, (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2003).

⁴⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*, (London: Sage Publication, 2009), 173.

1.6 Sistematika Pembahasan

Agar hasil dari penelitian ini dapat dibaca dan dicermati dengan mudah, maka terdapat sistematika tertentu untuk menyajikannya. Untuk menjelaskan mengenai dampak dari KORUS FTA terhadap perubahan kebijakan buruh di Korea Selatan, pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai KORUS FTA (*Korea - United States Free Trade Agreement*). Bagian ini kemudian akan dibagi menjadi tiga sub-bagian, yaitu membahas mengenai faktor pendorong kerjasama Korea Selatan dan Amerika Serikat, hubungan kedua negara di bidang ekonomi, serta penjelasan mengenai KORUS FTA itu sendiri.

Selanjutnya bagian kedua akan membahas dampak KORUS FTA terhadap kebijakan buruh di Korea Selatan pada periode 2012-2015. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai pasar tenaga kerja di Korea Selatan, karakteristik buruh dan organisasi buruh di Korea Selatan, kebijakan buruh sebelum diberlakukannya KORUS FTA, kebijakan buruh setelah diberlakukannya KORUS FTA, serta analisis dampak KORUS FTA terhadap reformasi kebijakan buruh di Korea Selatan pada tahun 2012-2015. Diharapkan melalui sistematika pembahasan di atas, pembaca dapat memahami tulisan ini dengan lebih baik, jelas, dan sistematis.